

	News Title : Gelar Bulan Literasi PBK 2024, Bappebti Dorong Transformasi Digital Industri PBK	
	Media Name : kontan.co.id	Journalist : Istimewa
	Publish Date : 06 August 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Noneng (Kepala Disperindag Jabar), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Industri	Topic : Literasi PBK

Gelar Bulan Literasi PBK 2024, Bappebti Dorong Transformasi Digital Industri PBK



KUSTRAS, Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kasan membuka kegiatan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 2024 dengan mengangkat tema "Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital yang Berjangka di Bandung, Jawa Barat, Senin (5/8). Sumber: [Pressrelease.id](#) | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menekankan, industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) tetap harus bertransformasi secara digital. Realisasi, perkembangan ekonomi mengharuskan perdagangan digital sehingga PBK menjadi salah satu instrumen strategis untuk diperkuat.

Demikian disampaikan Kasan dalam Pembukaan Bulan Literasi PBK 2024 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat pada hari ini, Senin (5/8). Bulan Literasi PBK 2024 mengusung tema "Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital".

"Industri PBK perlu dimaksimalkan dan bertransformasi di era digital. Sejalan dengan itu, diperlukan strategi penguatan transaksi multilateral antara lain dengan inovasi produk/kestrak baru, mencari pasar (anggota) baru, serta penguatan regulasi. Paralel dengan itu, diperlukan pula penguatan perlindungan masyarakat agar aman dalam bertransaksi dan mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap berkembangnya industri PBK, khususnya transaksi multilateral," jelas Kasan.

Kasan menambahkan, industri PBK harus bersiap diri dengan baik menghadapi proses pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025 mendatang.

"Industri PBK perlu bersiap diri mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dan peraturan turunannya sedang difinalisas. Transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK dan BI akan mentransformasi industri PBK. Hal ini dapat menjadi momentum bagi Bappebti dan pelaku usaha dalam memperkuat kolaborasi untuk pengembangan kontrak multilateral dan transaksi bilateral," jelas Kasan.

Kasan juga berharap, Bursa Berjangka dan Lembaga Kiring juga harus lebih kreatif membuat kontrak komoditas termasuk pengembangannya, baik untuk transaksi fisik maupun futures, melalui kolaborasi bersama asosiasi, industri, dan pelaku usaha. Dengan demikian, kontrak yang dipedagangkan benar-benar sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat.

Kompetensi pelaku usaha juga menjadi salah satu kunci peningkatan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, asosiasi PBK perlu melakukan berbagai pelatihan dan optimalisasi peran Lembaga Sertifikasi Profesi PBK yang telah dibentuk tahun lalu.

Kasan juga meminta Bappebti untuk terus menumbuhkan ekosistem PBK menjadi lebih baik. "Kuatkan pengawasan, tindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dan tentunya perkuat secara masal. Untuk itu, mari satukan langkah mewujudkan ekosistem industri PBK yang aman dan nyaman untuk berinvestasi," lanjut Kasan.

Bappebti mencatat, nilai transaksi PBK pada 2023 secara Notional Value (NV) mencapai Rp25,680 triliun. Pada semester I 2024, kinerja PBK tercatat Rp14,594 triliun. Transaksi tersebut masih lebih didominasi bilateral seperti forex, single stock, dan index dibandingkan multilateral. Pada 2023, transaksi bilateral mencapai Rp25,273 triliun, sedangkan multilateralnya mencapai Rp407,1 triliun.

Caluputan komoditas yang ditransaksikan dalam PBK masih terkonsentrasi pada timah, crude petroleum oil (CPO), olein, kakao, kopi, dan emas digital. "Padahal, Indonesia merupakan produsen/eksportir komoditas strategis di pasar lokal dan global, seperti karet, kelapa, nikel, batu bara, dan produk perikanan. Jadi, kinerja PBK masih berpeluang besar untuk ditingkatkan," imbuh Kasan.

Lebih lanjut, perdagangan merupakan salah satu kunci penguat ekonomi Indonesia. Pada 2023, perdagangan berkontribusi 12,94 persen bagi Produk Domestik Bruto (PDB) atau menempati urutan kelua setelah sektor industri pengolahan. Dengan demikian, peran perdagangan harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan fokus untuk Indonesia Emas 2045.

Kasan menyatakan, sejumlah tantangan ekonomi dan perdagangan tengah dihadapi, baik di tataran nasional maupun global. Kondisi geopolitik yang belum stabil, perubahan iklim seperti fenomena El Niño dan La Niña, serta adanya kebijakan pengurangan beberapa negara terkait ekspor dan impor. Hal-hal tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia, terganggunya pasokan dalam negeri dan ketidakstabilan harga, terganggunya jalur distribusi, serta tidak efisiennya produktivitas di dalam negeri.

"Namun, kita patut syukuri, karena perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 50 bulan berturut-turut, sejak Mei 2020 hingga saat ini. Surplus artinya nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Juni 2024, tercatat surplus USD 2,39 miliar atau turun 18,4 persen dibanding Mei 2024. Total ekspor Indonesia pada Juni 2024 tercatat USD 20,84 miliar atau turun 6,65 persen dibandingkan Mei 2024," tambah Kasan.

Turut hadir 'Saf' Alih Bidang Manajemen dan Tata Kelola Business Area serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jawa Barat Noneng Komara Nengih. Hadir pula perwakilan kementerian/lembaga antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN), Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar, dan Dinas Perdagangan Provinsi Jabar.

Adapun pembukaan dihadiri sekitar 300 peserta yang meliputi pelaku usaha dan asosiasi PBK, asosiasi komoditas, aparat penegak hukum, penda Jawa Barat, sivitas akademika di Bandung dan sekitarnya, serta media.

Kepala Disperindag, Jabar Noneng mengapresiasi adanya Bulan Literasi PBK 2024. Ia berharap, agenda peningkatan literasi PBK tidak hanya terhenti di pembukaan, tapi berlanjut sepanjang tahun. "Semula tujuan ekonomi Jawa Barat mendorong industri pengolahan dan perdagangan. Penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan literasi perdagangan, khususnya PBK," ujar Noneng.

Sementara Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menyampaikan dalam laporannya, Bulan Literasi PBK kali ini merupakan kali kedua setelah digelar pada tahun lalu. Acara ini digelar Bappebti bersama Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) dan organisasi regulator mandiri (self-regulatory organization/SRO) industri PBK.

"Memasuki penyelenggaraan tahun ke-2, tujuan Bulan Literasi PBK adalah menguatkan perlindungan masyarakat sebagai nasabah PBK melalui penguatan literasi yang baik dan benar. Selain itu, mendorong peningkatan transaksi multilateral PBK untuk komoditas strategis Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengurangi aduan dan penelisihan di bidang PBK," ungkap Tirta.

Diakhir menghadirkan narasumber Tirta Karma Senjaya, Direktur Utama Bursa Berjangka StephensPadua Luminating, Ketua Umum ASPEBTINDO Udi Margono, Direktur Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Fajar Wibihyadi, serta praktisi PBK Ryan Filbert. Bertindak sebagai moderator Sekretaris Bappebti Oly Andhiantita.

"Sesuai arahan Menteri Perdagangan, Bappebti diharapkan menjadi pembentuk harga rujukan komoditas strategis Indonesia. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin jika mampu jika seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi," jelas Oly.

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan selama Bulan Literasi PBK 2024 yaitu seminar, gelar wicara (talk show), similar (podcast), sosialisasi Trading Goes to Campus, dan Market Update. Adapun kota pelaksanaan meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Batam, Manado dan Pontianak dengan target peserta sebanyak 1,5 juta orang.